

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Edi, *KPK dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Revisi*, PT. Depublish, Cet. Pertama, 2021.
- Abdullah, Karimuddin dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2015.
- Arif, Asep, *Manajemen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca UU KPK 19/2019*, Raja Grafindo Pers, 2021.
- Assiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepanitraan MKRI.
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, 2004.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, 2008.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, 2004.
- Dwipayana, Gede, *Membongkar Gurita Cendana: Skandal Korupsi dan Oligarki di Indonesia*, Kompas, 2006.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Handoyo, Eko, *Pendidikan Anti Korupsi, Cetakan Ke-1*, Ombak Dua 2013.
- HS, Salim. *Hukum Pidana Khusus*, Raja Prasindo, 2019.
- Indrayana, Denny, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, 2016.
- Iqbal, Muammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenamedia Group, 2014.
- Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara, Cetakan Ke-1*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Khallâf, Abdul Wahhab, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Syū‘ūn al-Dustūrīyah wa al-Khārijīyah wa al-Māliyah*, Maktabah Salafiyah, 1350 H/1931M.
- KPK, *Laporan Tahunan KPK 2019*, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020.
- Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, 2015.
- Kusuma, Dr. I. Made Hendra, *Pembaruan Kewenangan KPK dalam Prospektif Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum*, PT Alumni Penerbit Akademik, 2019.
- Lestari, Nadia, Achmad Firdaus, *Tata Kelola dan Independensi Lembaga Antikorupsi*, 2022.
- MD, Moh. Mahmud, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, 2000.

- Muqqodas, Busyro, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2013.
- Nasution, Kaka Alvin, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, 2010.
- Nurtjahjo, Hendra, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, 2005.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2015.
- Rachmawati, Dian dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi Cetakan Ke-1*, Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK, 2023.
- Rahman, Yulis, *Politik Hukum dan Reformasi Kelembagaan Antikorupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, 2021.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Liberty, 1986.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Rosda, 2014.
- Watch, Indonesia Corruption, *Analisis Revisi UU KPK: Pelemahan Yang Sistematis*, ICW, 2020.
- Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UNISSILA PRESS, 2016.
- Zulaiha, Aida Ratna, *Mengkaji untuk Membasmi: Kajian Direktorat Monitoring KPK 2020-2024*, Kompas Publishing, 2025.

JURNAL

- Akhmaddhian dkk, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Logika*, Volume 13 No. 01, (2022).
- Anis Wijayanti & Azhar Kasim, “Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2021).
- Arfiani, Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 7 No. 3 (Oktober 2023).
- Christine S. T. Kansil dkk, "Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 No. 1, (2022).
- Daun dkk, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyadapan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 9 No. 5, (2021).
- Dimas Bayunegara & Irwan Triadi, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Quantum Juris*, Volume 7 No 1, (Januari 2025).
- Dzulkifli Syafar Nur Magister dkk, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan dan Penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi”, *Journal of Lex Generalis*, Volume 1 No. 7, (2021).
- Fransina Pattiruhu dkk, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Pasal 29E dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi”, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, (Februari 2025).

Frisca Tyara M Fanhar, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Corruptio*, Volume 1 No. 2 (Desember 2020).

Kartika Sasi Wahyuningrum dkk, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?, *Refleksi Hukum*, Volume 4 No. 2 (Juli 2020).

Marwan Mas, “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Superbody Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 42 No. 1 (2013).

Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-undang KPK, *Justitia*, Volume 4 No. 1 (2020).

Ovial Falah Parama dan Sholahuddin Al-Fatih, Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Rumpun Lembaga Eksekutif, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4 No. 1 (Maret 2021).

Pinilih, S. A. G., Politik Hukum Kedudukan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8 No. 1, (2020).

Ria Casmi Arrsa, Urgensi Membentuk KPK di Daerah, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 2, No. 1, (Agustus, 2016).

Taufany Ikmal Billah, “Akibat Hukum Perubahan Kedudukan dan Tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, *Brawijaya Law Student Journal*, Desember 2022 (terbit 6 Februari 2023).

Unggul Satriyo, Diskursus Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen Pasca Putusan MK No.70/PUU-XVII/2019, *Al-Qisth Law Review*, Volume 6 No. 2, (Februari 2023).

Wahib Wahib, Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua UU KPK, *Rechtsregel*, Volume 5 No. 1 (Maret 2021).

Wawan Sanjaya, “Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri, Kejaksaan dan KPK terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal de Jure*, Vol. 10, No. 1, (2024).

Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 18 No. 2, (November, 2021).

Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, (September 2022).

UNDANG-UNDANG

Pasal (1) Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

SKRIPSI

Aditya Dwi Prayudi, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi, (Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019).

Faizal Muhamad Toha, Prinsip Asas Good Governance terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ditinjau Perspektif Siyasah Dusturiyah, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Hesty Puspita Sari, Analisis Fiqh Siyasah terhadap Fungsi dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Indira Putri Maharani, Makna Kata “Mengkoordinasikan” dan “Mengendalikan” dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Skripsi Universitas Brawijaya, 2024.

M. Nuzulul Hidayat, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi IAIN Curup Bengkulu, 2022).

Muhammad Irfan Makhsum, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas KPK, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Muhammad Rayhan Harahap, Efektivitas Peradilan Koneksitas terhadap Sistem Peradilan di Indonesia, (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024).

Wira Utama, Optimalisasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum, (Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025).

INTERNET

Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi. “Tentang KPK-Sekilas KPK”, Jakarta: KPK, diakses via situs resmi KPK (6 Agustus 2025)

KPK, Sinergi KPK - Pemda: Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah Demi Efektivitas Pelayanan Publik, *Komisi Pemberantasan Korupsi RI*, diakses Pukul 15:23 WIB pada 24 Oktober 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/sinergi-kpk-pemda-dorong-penguatan-tata-kelola-daerah-demi-efektivitas-pelayanan-publik>

Willy Medi Christian Nababan, “Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah Dapat Rapor Merah Pencegahan Korupsi”, *Kompas*, diakses pada 22 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-dapat-rapor-merah-pencegahan-korupsi>

KPK, KPK Tangkap Tangan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan di Sumatera Utara, *Komisi Pemberantasan Korupsi RI*, diakses Pukul 15:47 WIB pada 24 Oktober 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tangkap-tangan-korupsi-proyek-pembangunan-jalan-di-sumatera-utara-1>

